



Judul : Tekanan transisi energi, utamakan ketahanan energi nasional kita
Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Tekanan Transisi Energi Utamakan Ketahanan Energi Nasional Kita

ANGGOTA Komisi VII DPR Mulyanto meminta Pemerintah mengimplementasikan transisi energi fosil ke energi baru energi terbarukan (EBET). Transisi dilakukan secara bertahap sesuai rencana dalam Kebijakan Energi Nasional tanpa pengaruh kepentingan negara lain.

Mulyanto menegaskan, transisi listrik berbasis EBET ini tidak boleh didasarkan pada tekanan internasional. "Kita kan negara berdaulat. Program-program pembangunan nasional kita, termasuk pembangunan bidang energi, haruslah didasarkan pada *national interest*, yakni ketahanan energi nasional," ujarnya.

Dia menjelaskan, tenaga listrik yang ada saat ini masih tergantung pada sumber batu bara. Lebih dari enam puluh persen pembangkit listrik adalah PLTU. Namun Indonesia bertekad menjadi negara dengan NZE (*net zero carbon emissions*) pada tahun 2060. Hal ini juga ditegaskan dalam dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang draf revisinya masih terus dibahas Komisi VII DPR.

Mulyanto lalu menyoroti program PLN 2024-2033 yang dianggap paling hijau. Karena, sampai tahun 2030 PLN akan menambah kapasitas terpasang sebesar 21 GW pembangkit, sebesar 51,6 persennya berasal dari sumber EBET. Bahkan PLN punya target hingga tahun 2040 mendatang akan ada penam-

bahan kapasitas pembangkit listrik hingga 80 Gigawatt (GW), sebesar 75 persennya berasal dari EBET dan 25 persen sisanya berasal dari pembangkit berbasis gas.

Namun, lanjutnya, dalam implementasinya rencana tersebut bisa saja berubah mengikuti perubahan dinamika lingkungan strategis yang ada. Karena kita adalah negara yang kaya dengan sumber daya batu bara. "Tentu sumber daya ini tidak akan kita anggurkan. Selain itu dengan harga listrik EBET yang ada sekarang jangan membebani masyarakat atau menambah anggaran subsidi negara," jelas Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah jangan latah menerapkan konsep *power wheeling* yakni pihak pembangkit listrik dapat menjual listriknya secara langsung kepada pelanggan. Karena ini berarti meliberalisasi sektor kelistrikan, di mana BUMN PLN tidak lagi menjadi *single buyer*, *single seller* listrik.

Dia lalu menyoroti kapasitas nasional atau pemenuhan kandungan lokal (TKDN). Dia tidak ingin komponen dan jasa pembangkit listrik yang berasal dari sumber EBET ini tergantung pada atau didominasi oleh sumber impor. Diharapkan, sumber domestik bisa mengisi lebih dari 40 persen komponen. Oleh karena itu, tetap perlu adanya pembatasan-pembatasan impor. ■ KAL